

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam pengelolaan dana desa diharuskan adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas melibatkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Pertanggungjawaban terkait finansial yang ada dalam APBDesa dimana dana desa sebagai salah satu komponennya. Akuntabilitas tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang ditetapkan melainkan untuk memperhatikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan dana desa harus didasari pada prinsip akuntabilitas, sehingga menarik untuk diteliti karena jika tidak terlaksananya prinsip akuntabilitas akan menyebabkan penyelewengan pengelolaan dana desa.

Sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014, desa mendapatkan kesempatan besar dalam mengurus pemerintahannya sendiri dan melaksanakan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan. Pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas. Desa mendapatkan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana desa. Dana desa yang cukup besar telah dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk diserahkan ke pemerintah desa. Hal ini dibuktikan

dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) Eko Putro Sandjojo menyatakan dalam Kompas.com bahwa dana desa yang di salurkan ke desa mengalami peningkatan selama 5 tahun dengan total dana desa sebesar Rp 257 Triliun. Rinciannya, Rp 20,67 Triliun tahun 2015, Rp 46,98 Triliun tahun 2016, Rp 60 Triliun tahun 2017, Rp 60 Triliun tahun 2018 dan Rp 70 Triliun tahun 2019.

Dikeluarkannya dana desa memunculkan suatu permasalahan dalam pengelolaannya berupa penyelewengan dana desa. Di Sumatera Barat tepatnya di nagari Talang Babungo, Kecamatan Giliran Gumanti, Kabupaten Solok dilakukan oleh Walinagari dan Bendahara. Dana sebesar Rp 800 juta telah digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini membuktikan bahwa masih lemahnya pengawasan sehingga memberikan celah terjadinya penyalahgunaan dana desa.

Nagari Situjuh Batua yang terletak di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa Tingkat Sumatera Barat Tahun 2019, terpilih sebagai perwakilan Kabupaten Lima Puluh Kota dan mendapatkan juara ke dua. Ini membuktikan bahwa dana desa memiliki peran dalam menunjang aktivitas ekonomi dan pengelolaan dana desa sudah baik sehingga kesejahteraan masyarakatnya juga lebih baik. Nagari Situjuh Batua juga mendapatkan status sebagai nagari mandiri dengan IDM 0,8971 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020. Ini membuktikan bahwa Nagari Situjuh Batua mampu mengelola sumber daya manusia dan alamnya dengan baik sehingga memiliki status sebagai nagari

mandiri. Disini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apakah dengan mendapatkan juara ke dua dalam Kompetensi dan Transparansi Dana Desa Tingkat Sumatera Barat Tahun 2019 serta memiliki status sebagai nagari mandiri, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban sudah diterapkan dengan benar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua?
2. Bagaimana praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun dalam lima bab. Adapun isi dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

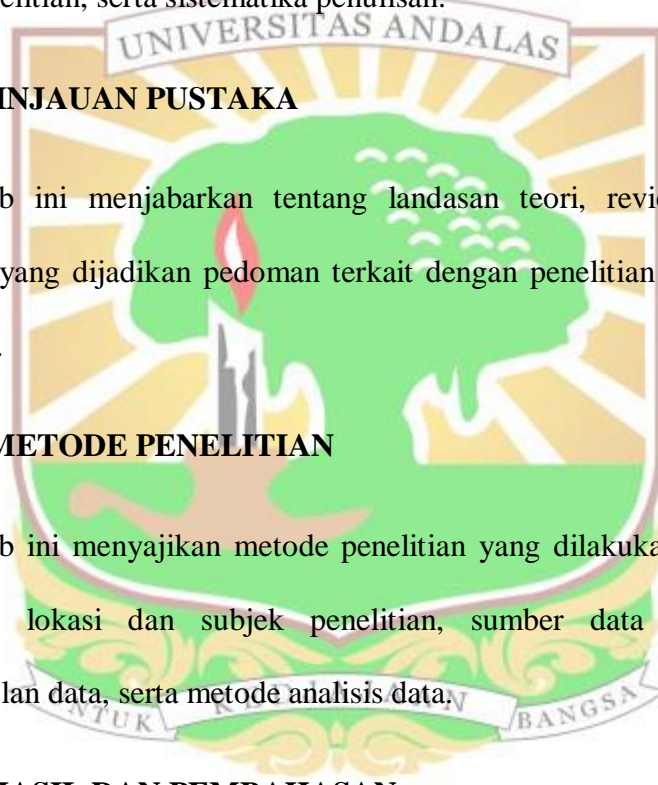
Bab ini menjabarkan tentang landasan teori, review atas penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman terkait dengan penelitian ini, serta kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menyajikan metode penelitian yang dilakukan yang berisi jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai hasil data yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan alat dan analisis data sehingga akan menjawab rumusan masalah.



## **BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dari pembahasan penelitian secara keseluruhan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang bersifat membangun.

